



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 3 Nomor 4 Tahun 2023 Page 892-906

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan APBD di Kecamatan Telukjambe Timur pada Tahun 2017-2021

Dhava Lintang Pramudya<sup>1✉</sup>, Suparno<sup>2</sup>

S1 Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Singaperbangsa Karawang

Email: [dhava.lintang.p@gmail.com](mailto:dhava.lintang.p@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mengidentifikasi bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan pada APBD di Kecamatan Telukjambe Timur, mengidentifikasi bagaimana efisiensi pengelolaan keuangan pada APBD di Kecamatan Telukjambe Timur. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kuantitatif rasio. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kecamatan Telukjambe Timur menunjukkan cukup stabil. Pola perkembangan efektivitas pengelolaan keuangan Kecamatan Telukjambe Timur selama tahun 2017 - 2021 mengalami kestabilan dengan tingkat rata-rata per tahun sebesar 89,24% yang berarti pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur cukup efektif. Pola perkembangan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur selama tahun 2017 - 2021 cukup stabil dengan tingkat rata-rata per tahun sebesar 86,66% yang berarti pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur cukup efisien.

Kata Kunci: *Efektivitas, Efisiensi, APBD*

### Abstract

This study aims to find out and identify how effective financial management is in the APBD in Telukjambe Timur District, identify how efficient financial management is in the APBD in Telukjambe Timur District. The research method used in this research is ratio quantitative analysis. The results of the study show that the regional financial management of Telukjambe Timur District is quite stable. The pattern of development of the effectiveness of financial management in East Telukjambe District during 2017 - 2021 experienced stability with an annual average rate of 89.24%, which means that regional financial management in East Telukjambe District is quite effective. The pattern of development of the efficiency of regional financial management in East Telukjambe District during

2017 - 2021 is quite stable with an annual average rate of 86.66%, which means that regional financial management in East Telukjambe District is quite efficient.

Keywords: *Effectiveness, Efficiency, APBD*

## PENDAHULUAN

Menurut (Ratmono.Dwi, 2015), akuntansi sektor publik adalah proses pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, serta pelaporan transaksi keuangan dari entitas pemerintah daerah guna pengambilan keputusan ekonomi yang bermanfaat bagi pihak eksternal.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2018 tentang Kecamatan, disebutkan bahwa kecamatan adalah sebuah perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintahan umum. Kelurahan dalam PP Kecamatan disebutkan sebagai perangkat Kecamatan, Kelurahan bukan lagi perangkat daerah, hal ini adalah Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pelimpahan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota kepada Kecamatan dilaksanakan untuk mengefektifkan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kecamatan dan mengoptimalkan pelayanan publik di Kecamatan sebagai perangkat daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana keuangan pemerintah daerah selama satu tahun yang ditetapkan oleh peraturan daerah. APBD dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya mengenai prioritas pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan pihak legislatif, DPRD.

APBD terdiri dari tiga komponen utama yaitu pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah terdiri dari pos Pendapatan Asli Daerah (PAD), pos Dana Perimbangan, dan pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Di dalam pos PAD ada komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang merupakan sumber pendapatan utama dari pemerintah daerah itu sendiri yang diperoleh dari wajib pajaknya. Selanjutnya untuk Dana Perimbangan merupakan dana yang diperoleh pemerintah daerah dari pemerintah pusat sebagai perwujudan dari pelaksanaan desentralisasi fiskal. Selain sumber pendapatan yang diperoleh dari daerah tersebut dan pemerintah pusat, pemerintah daerah juga memperoleh pendapatan dari daerah lain yang berupa komponen Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan pemda lainnya yang ada di dalam pos Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

APBD menjadi acuan dalam mengukur seberapa besar pencapaian efektivitas dan efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menyejahterakan masyarakatnya lewat penyelenggaraan otonomi daerah. Anggaran merupakan sebuah alat yang berpengaruh besar terhadap perencanaan suatu daerah maupun pengendalian pada organisasi pemerintah.

Untuk mengukur tingkat efisiensi dapat dilakukan dengan membandingkan antara masukan dan keluaran. Efisiensi penyerapan anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pelaporan keuangan daerah. Sedangkan efektivitas anggaran belanja juga menjadi salah satu tolak ukur terhadap pencapaian pemerintah daerah akan seluruh sasaran yang diprogramkan dan ditargetkan, apakah terlaksana dengan baik atau tidak.

Berdasarkan komplain masyarakat mengenai kurangnya pasokan air di wilayah Darwin di Australia, distribusi keuangan dalam bidang infrastruktur di wilayah negara bagian *Northern Territory*, Pemerintah regional membantu menjamin pasokan air untuk wilayah Darwin yang lebih luas, dengan \$300,6 juta dari \$8,9 miliar Dana Jaringan Air Nasional. Meningkatkan akses air yang andal akan menarik lebih banyak investasi sektor energi. Ini akan membantu memenuhi permintaan pengguna industri *Middle Arm* akan air, yang mungkin tumbuh hingga 27.000 Mega liter per tahun pada tahun 2050. (Government, 2022). Dari keberhasilan dan program ini seharusnya Indonesia dapat mencontoh, mengingat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan dengan sumber air yang sangat berlimpah, seharusnya Indonesia juga dapat mencontoh dan berhasil dengan lebih baik.

Di Indonesia sendiri, Sepanjang masa pandemi pemerintah pusat berhasil mengakselerasi belanja negara sebesar Rp1.841,10 triliun, atau sekitar 67,21% dari pagu Perpres 72/2020 (Kemenkeu, 2020). Realisasi belanja tersebut meliputi belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.211,40 triliun (61,3%) dan realisasi transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp629,70 triliun (82,4%). Namun sayangnya, kualitas serapan anggaran daerah belum sesuai harapan. Pasalnya, masih banyak pemerintah daerah (Pemda) yang mengendapkan anggarannya di bank-bank umum (Ekonomi.bisnis.com, 2020).

Diperoleh informasi bahwa kontribusi terbesar penyerapan belanja Kementerian/Lembaga di dominasi oleh wilayah Indonesia Barat yang mencapai 80,4 persen. Sedangkan yang mengalami perlambatan penyerapan terbanyak berada di wilayah Indonesia Timur. Sedangkan untuk realisasi dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan masih relatif kecil, namun secara penyerapan dana Dekonsentrasi lebih tinggi, baik dibandingkan Kantor Pusat (KP) maupun Kantor Vertikal di Daerah (KD). Hal ini telah dikritik langsung oleh Kementerian Keuangan Sri Mulyani yang mengatakan bahwa minimnya daerah mendapatkan PAD. Dalam 3 tahun terakhir PAD ini masih berkisar di 24,7 persen

(Merdeka.com, 2021).

Di Kabupaten Karawang, Gerakan Mahasiswa Karawang (GEMAK) menyampaikan, audit BPK Karawang tahun 2019, BPK menemukan 147 penerima beasiswa yang namanya tercantum dua kali. Tahun 2020, kesalahan itu kembali terulang, terdapat 14 orang yang namanya tercantum dua kali sebagai penerima beasiswa. Bila ditotal, 147 penerima beasiswa yang namanya ganda ini menerima anggaran Rp 205 juta. Ratusan juta rupiah ini direalisasikan dua kali kepada 147 penerima yang sama. Dari audit BPK tahun 2020, ditemukan fakta ada mahasiswa yang menggunakan uang beasiswa untuk membeli ponsel dan emas. Padahal, beasiswa Karawang Cerdas diperuntukkan untuk pelajar tidak mampu yang berprestasi dan cerdas (Karawang, 2021). Dari temuan BPK tidak boleh dianggap sepele, agar adanya evaluasi dan transparansi program Karawang Cerdas.

Di Telukjambe Timur, Bencana banjir melanda Dusun Pangasinan, Desa Karangligar, Kecamatan Telukjambe Barat Senin 8 November 2021. Akibat banjir tersebut sebanyak 216 rumah warga dilaporkan terendam air bah setinggi 10 cm hingga 1 meter. Banjir merendam kawasan tersebut sejak Jumat 5 November 2021. Namun, banjir sempat surut satu hari dan kembali datang, Senin dini hari 8 November 2021 (Tim Priangan Timur News, 2021). Dengan adanya fenomena ini maka dapat dikatakan infrastruktur di wilayah Telukjambe Timur belum signifikan.

Di Telukjambe Timur, dana pemerintah yang mengendap di bank mencapai Rp1,8 M pada 2021. Padahal pada 2019 dan 2020 dana pemda di perbankan bisa dijaga di bawah Rp1 M yakni sebesar Rp900 juta dan Rp600 juta. Dana pemda yang mengendap di bank pada 2021 meningkat 10,38 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp600 juta. Menkeu berharap pemda dapat mempercepat melakukan belanja seiring dengan percepatan transfer dana dari pemerintah pusat dan peningkatan penerimaan pajak daerah (KABARKARAWANG, 2022). Ini menggambarkan sebetulnya pemda punya potensi besar untuk mendorong pemulihan ekonomi dengan menggunakan dananya, APBD-nya untuk bisa mengakselerasi pemulihan di masing-masing daerah. Pengelolaan keuangan pada APBD di Kecamatan Telukjambe Timur perlu diperiksa Efektivitas dan Efisiennya agar dapat menjamin pembangunan yang berkelanjutan di daerah tersebut.

Kecamatan Telukjambe Timur merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Telukjambe, pusat pemerintahan kecamatan ini terdapat di Desa Telukjambe. Berbatasan dengan Kecamatan Karawang Barat di utara, Kecamatan Telukjambe Barat di barat, Kecamatan Ciampel di timur, dan Kabupaten Purwakarta di selatan. Jumlah desa di Kecamatan Telukjambe Timur adalah 9 desa. Adapun desa di Kecamatan Telukjambe Timur adalah Desa Sirnabaya, Desa Pinayungan, Desa Telukjambe, Desa Puseurjaya, Desa

Sukaluyu, Desa Sukaharja, Desa Wadas, Desa Sukamakmur, dan Desa Purwadana. Di Kecamatan Telukjambe Timur ini juga berdiri Kawasan industri yang cukup luas yaitu Kawasan Industri Internasional City (KIIC). Terdapat juga Kawasan perumahan dan pertokoan yang cukup besar yaitu Kawasan Galuh Mas dan Grand Taruma.

Kecamatan Telukjambe Timur merupakan kecamatan pemekaran dari Kecamatan Telukjambe, pusat pemerintahan kecamatan ini terdapat di Desa Telukjambe. Berbatasan dengan Kecamatan Karawang Barat di utara, Kecamatan Telukjambe Barat di barat, Kecamatan Ciampel di timur, dan Kabupaten Purwakarta di selatan. Jumlah desa di Kecamatan Telukjambe Timur adalah 9 desa. Adapun desa di Kecamatan Telukjambe Timur adalah Desa Sirnabaya, Desa Pinayungan, Desa Telukjambe, Desa Puseurjaya, Desa Sukaluyu, Desa Sukaharja, Desa Wadas, Desa Sukamakmur, dan Desa Purwadana. Di Kecamatan Telukjambe Timur ini juga berdiri Kawasan industri yang cukup luas yaitu Kawasan Industri Internasional City (KIIC). Terdapat juga Kawasan perumahan dan pertokoan yang cukup besar yaitu Kawasan Galuh Mas dan Grand Taruma. (Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang, 2022).

Landasan hukum tentang keuangan negara diatur dalam Pasal 9 ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003) tentang upaya peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga menyatakan:

“Dalam rangka peningkatan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Kementerian/Lembaga sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, dilakukan penandatanganan Nota Kesepahaman antara Kementerian Keuangan dengan Kementerian Negara/Lembaga pengelola Penerimaan Negara Bukan Pajak.”

Jika melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (1) (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, 2003) ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, yaitu:

“Menteri/Pimpinan lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota yang terbukti melakukan penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan dalam undang-undang tentang APBN/Peraturan Daerah tentang APBD diancam dengan pidana penjara dan denda sesuai dengan ketentuan undang-undang.”

Kecamatan Teluk Jambe Timur merupakan daerah industri dan pusat perniagaan, perdagangan di samping itu juga pertanian masih merupakan potensi yang perlu diintensifkan dan dipertahankan keberdayaannya, terutama di wilayah barat Teluk Jambe Timur yang meliputi Desa Purwadana, Desa Wadas dan Desa Sukamakmur yang luas area

persawahannya masih cukup luas. Adapun letak Kecamatan Teluk Jambe Timur sangat strategis, karena merupakan Kecamatan penyangga Ibu Kota Kabupaten dan merupakan gerbang masuk ke Kabupaten Karawang. Dengan adanya kawasan industri seperti : KIIC yang meliputi empat desa yaitu Desa Sirnabaya, Desa Puseurjaya, Desa Sukaluyu dan Desa Wadas dan di dalamnya terdiri dari industri berat sampai industri ringan, berada di kawasan tersebut, begitu pula kecamatan Teluk Jambe Timur, merupakan pusat perniagaan dengan adanya kawasan perumahan dan perdagangan/perniagaan Galuh Mas yang berada di Desa Sukaharja dan Puseurjaya. Hal ini sangat berpotensi sekali untuk pengembangan usaha kecil dan menengah dan *home industry* yang ada di wilayah kecamatan Teluk Jambe Timur. Potensi yang perlu mendapat perhatian untuk dibina dan dikembangkan di wilayah kecamatan Telukjambe Timur ini antara lain, Penataan kontrakan kamar yang semakin menjamur, Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima), Penataan pasar kaget setiap hari minggu di Galuh Mas, Produk unggulan yang mempunyai ciri khas tersendiri.

Berdasarkan Anggaran Belanja Kecamatan Telukjambe Timur untuk Desa Telukjambe sebesar Rp. 2 Miliar. Dan 60% (Rp. 1,2M) dari anggaran belanja tersebut dialokasikan untuk kebutuhan infrastruktur seperti jalan raya, gorong-gorong, dsb.(radarkarawang.id, 2020). Fakta di lapangan, biaya yang digunakan untuk infrastruktur tidak seperti apa yang di rencanakan. Nyatanya desa Telukjambe merupakan salah satu desa yang terdampak banjir pada November 2021.

Tabel 1.

Kondisi target dan realisasi belanja di Kecamatan

Tahun	Kecamatan Telukjambe Timur		
	Target Belanja	Realisasi Belanja	Selisih
2017	13.324.000.000	12.239.000.000	1.085.000.000
2018	16.391.781.500	15.164.968.000	1.226.813.500
2019	17.835.200.000	16.879.576.122	955.623.878
2020	16.122.781.500	15.546.321.000	576.460.500
2021	16.119.221.000	14.317.326.800	1.801.894.200

Sumber: Badan Pusat Statistik Kec. Telukjambe Timur, Laporan Target dan Realisasi 2017-2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel target dan realisasi di Kecamatan Telukjambe Timur target belanjanya pada tahun 2017 sebesar Rp. 13.324.000.000 dan realisasi belanja sebesar Rp. 12.239.000.000 serta surplus sebesar Rp. 1.085.000.000, sedangkan pada tahun 2018 target belanjanya di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp 16.391.781.500 dan realisasi belanja Rp. 15.164.968.000 serta surplus Rp. 1.226.813.500, sedangkan pada tahun 2019 target

belanjanya di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 17.835.200.000 dan realisasi belanja Rp. 15.243.576.122 serta surplus Rp. 2.591.623.878, sedangkan pada tahun 2020 target belanjanya di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 16.122.781.500 dan realisasi belanja Rp. 15.546.321.000 serta surplus Rp. 576.460.500, Dan ditahun 2021 target belanja di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 16.119.221.000 dan realisasi belanja Rp. 15.317.326.800 serta surplus Rp. 801.894.200. Yang artinya dari tahun 2017 sampai 2021 realisasi belanja belum mencapai dari target belanja yang diharapkan.

Tabel 1

Kondisi target dan realisasi pendapatan di Kecamatan

Tahun	Kecamatan Telukjambe Timur		
	Target Pendapatan	Realisasi Pendapatan	Selisih
2017	15.325.000.000	14.451.000.000	(-874.000.000)
2018	18.635.332.000	17.122.340.000	(-1.512.992.000)
2019	19.800.000.000	18.964.374.000	(-835.626.000)
2020	18.289.500.000	17.222.440.300	(-1.067.059.700)
2021	19.250.000.000	17.863.231.000	(-1.386.769.000)

Sumber: Badan Pusat Statistik Kec. Telukjambe Timur, Laporan Target dan Realisasi 2017-2021 (data diolah)

Berdasarkan tabel target dan realisasi di Kecamatan Telukjambe Timur target pendapatan pada tahun 2017 sebesar Rp. 15.325.000.000 dan realisasi pendapatan sebesar Rp. 14.451.000.000 serta surplus sebesar Rp. 874.000.000, sedangkan pada tahun 2018 target pendapatan di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp 18.635.332.000 dan realisasi pendapatan Rp. 17.122.340.000 serta surplus Rp. 1.512.992.000, sedangkan pada tahun 2019 target pendapatan di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 19.800.000.000 dan realisasi pendapatan Rp. 18.964.374.000 serta surplus Rp. 835.626.000, sedangkan pada tahun 2020 target pendapatannya di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 18.289.500.000 dan realisasi pendapatan Rp. 17.222.440.300 serta surplus Rp. 1.067.059.700, Dan ditahun 2021 target pendapatannya di Kecamatan Telukjambe Timur sebesar Rp. 19.250.000.000 dan realisasi pendapatan Rp. 17.863.231.000 serta surplus Rp1.386.769.000.

Berdasarkan prinsip, asas, dan landasan umum penyusunan, pelaksanaan, pelaporan, pengawasan dan pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang diatur dalam Peraturan Pemerintah ini, Pemerintah Daerah diharapkan mampu menciptakan sistem Pengelolaan Keuangan Daerah yang sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat dengan tetap menaati peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta meninjau sistem tersebut

secara terus menerus dengan tujuan mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang efektif dan efisien yang menjadi permasalahan adalah bagaimana tingkat efektivitas dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur pada era saat ini.

Penelitian (Reni Widianingsih, Noviansyah Rizal, Fetri Setyo Liyundira) di kecamatan yang berbeda yaitu Kecamatan Tempeh juga menjelaskan bahwa belum sepenuhnya dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku. Tingkat efisiensi pengelolaan keuangan Kecamatan Tempeh mulai tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 berada pada tingkat kurang efisien.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas mengingat fenomena infrastruktur yang belum signifikan, kurang efektifnya program pemerintah, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian mengenai "Analisis Efektivitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan APBD di Kecamatan Telukjambe Timur pada tahun 2017-2021."

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis verivikatif dengan pendekatan kuantitatif.

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data sekunder seperti artikel/berita dari media *online*, internet, jurnal, buku, dokumentasi dan sumber lainnya. Setelah data-data terkumpul, data tersebut akan diolah sehingga akan menjadi sebuah informasi bagi peneliti tentang keadaan objek penelitian, serta informasi mengenai APBD Kecamatan Telukjambe Timur yang dibutuhkan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triangulasi. Teknik penarikan sampel dalam *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan penelitian dalam obyek/situasi sosial yang diteliti. Dalam penelitian ini, dasar pertimbangan tertentu dimaksudkan yaitu bahwa informan yang dipilih adalah orang-orang yang dianggap profesional dalam lingkup pemerintahan serta kaitannya dengan peranan Kecamatan Telukjambe Timur.

Teknik Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu analisis regresi linier berganda dengan pengujian hipotesis secara parsial dan simultan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengelolaan keuangan daerah Kecamatan Telukjambe Timur diselenggarakan sesuai

dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 yang kemudian diubah dan dilengkapi dengan ketentuan baru yang diatur dalam Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dengan transparan, tertib, teratur, efektif dan efisien.

#### Analisis Efektivitas

Pengertian efektivitas pada dasarnya berhubungan dengan pencapaian tujuan atau target kebijakan (hasil guna). Menurut Mardiasmo (2018:166) efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan (*spending wisely*). Efektivitas pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3 Tingkat Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Telukjambe Timur

Tahun	Target Belanja (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efektivitas (%)
2017	13.924.000.000	12.239.000.000	87
2018	16.968.744.000	15.164.968.000	89
2019	17.835.200.000	15.243.576.122	85
2020	16.722.781.500	15.546.321.000	92
2021	16.919.221.000	15.317.326.800	90,53
Rata-rata	16.473.989.300	14.702.238.384	89,24

Sumber: Peneliti, 2022

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas pada tahun 2017 dengan target belanja sebesar 13,9M dan realisasi belanja sebesar 12,2M maka tingkat efektivitas sebesar 87,% berarti cukup efektif. Sedangkan pada tahun 2018 target belanja mengalami kenaikan sebesar 16,9M yang di hasilkan dari pendapatan alokasi dana desa (ADD) yang meningkat dengan signifikan akan tetapi diikuti juga dengan kenaikan realisasi belanja menjadi 15,2M dengan begitu tingkat efektivitas sebesar 89,% berarti cukup efektif. Pada tahun 2019 target belanja mengalami kenaikan sebesar 17,8M yang di hasilkan dari pendapatan asli desa (PAD) dan surplus ditahun sebelumnya dan realisasi belanja sebesar 15,2M dengan begitu tingkat efektivitas sebesar 85,% artinya cukup efektif. Pada tahun

2020 target belanja sebesar 16,7M mengalami penurunan yang di akibatkan menurunnya pendapatan asli desa (PAD) dan realisasi belanja sebesar 15,5M dengan begitu tingkat efektivitas sebesar 92,% berarti efektif. Pada tahun 2021 target belanja sebesar 16,9M dan realisasi belanja sebesar 15,3M dengan begitu tingkat efektivitas sebesar 90,53% berarti efektif. Jika dibandingkan dengan tahun lainnya, maka dapat dilihat bahwa tahun 2020 yang paling unggul tingkat efektivitasnya dalam pengelolaan keuangan daerah di kecamatan Telukjambe Timur.

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator 'Efektivitas' sudah cukup baik. Efektivitas, dalam hal ini merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Faktor ini dapat dikatakan berhasil jika dijalankan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti temui pada indikator Efektivitas oleh Mardiasmo (2018) sudah cukup maksimal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tingkat pengelolaan keuangan Kecamatan Telukjambe Timur terhadap efektivitas sebesar 89% .

#### Analisis Efisiensi

Menurut Mardiasmo (2018:165) pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu produk atau hasil kerja tertentu dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya (spending well). Efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4 Tingkat Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah di Kecamatan Telukjambe Timur

Tahun	Realisasi Pendapatan (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Efektivitas
2017	14.451.000.000	12.239.000.000	84,69
2018	17.122.340.000	15.164.968.000	88,56
2019	18.164.374.000	15.243.576.122	83,92
2020	17.222.440.300	15.546.321.000	90,26
2021	17.863.231.000	15.317.326.800	85,74
Rata-rata	16.964.677.060	14.702.238.384	86,66

Sumber: Peneliti, 2022

Dari hasil perhitungan di atas menunjukkan bahwa tingkat efisiensi pada tahun 2017 dengan realisasi pendapatan sebesar 14,4M dan realisasi belanja sebesar 12,2M dengan begitu tingkat efisiensi sebesar 84,69% berarti cukup efisien. Pada tahun 2018 realisasi

pendapatan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya sebesar 17,1M yang di hasilkan dari pendapatan Alokasi dana Desa (ADD) yang meningkat cukup signifikan dan di ikuti dengan realisasi belanja yang meningkat sebesar 15,1M dengan begitu tingkat efisiensi sebesar 88,56% berarti cukup efisien. Pada tahun 2019 realisasi pendapatan sebesar 18,1M meningkat dari tahun sebelumnya yang di hasilkan dari Pendapatan Asli daerah (PAD) dan di ikuti dengan realisasi belanja yang sama dari tahun sebelumnya sebesar 15,2M dengan begitu tingkat efisiensi sebesar 83,92% artinya cukup efisien. Pada tahun 2020 realisasi belanja sebesar 17,2M mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang di sebabkan menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan di ikuti dengan realisasi belanja yang sama dari tahun sebelumnya sebesar 15,5M dengan begitu tingkat efisiensi sebesar 90,26% artinya efisien. Pada tahun 2021 realisasi belanja sebesar 17,8 dan realisasi belanja sebesar 15,3 dengan begitu tingkat efisiensi sebesar 85,74% artinya cukup efisien. Jika dibandingkan dengan tahun lainnya, maka dapat dilihat bahwa tahun 2020 yang paling unggul tingkat efisiensinya dalam pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur.

Berdasarkan analisis data yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator 'Efisiensi' sudah cukup baik. Efisiensi, dalam hal ini merupakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Faktor ini dapat dikatakan berhasil jika dijalankan dengan maksimal.

Berdasarkan hasil analisis yang peneliti temui pada indikator Efisiensi oleh Mardiasmo (2018) sudah cukup maksimal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa tingkat pengelolaan keuangan Kecamatan Telukjambe Timur terhadap efisiensi sebesar 87% .

#### Tindakan Beralasan

Tindakan Beralasan menurut Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005) yang di maksud yakni merumuskan kombinasi antara sikap pribadi dan atau orang banyak dan organisasi, norma yang dirasakan orang lain yang berpengaruh, dan motivasi untuk mematuhi segala prediktor perilaku yang dituju. Mekanisme ini didasarkan pada nilai harapan yang mendalilkan bahwa sikap diprediksi oleh keyakinan tentang kemungkinan bahwa perilaku yang diberikan menyebabkan konsekuensi tertentu, dikalikan dengan evaluasi seseorang terhadap konsekuensi tersebut.

Berdasarkan pada (*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri*) mengenai fungsi APBD, disebutkan bahwa Fungsi Anggaran daerah merupakan pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan. Pentingnya mengidentifikasi dan memprioritaskan sektor-sektor yang membutuhkan keuangan terutama dalam penanggulangan banjir. Dana dapat dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan

sistem drainase, bendungan, tanggul, dan infrastruktur lainnya yang berperan dalam penanggulangan banjir. Penggunaan teori alokasi sumber daya publik dapat membantu dalam menentukan prioritas infrastruktur yang paling penting dan efisien dalam mengurangi risiko banjir. Diharapkan APBD dapat di optimalkan untuk meminimalkan risiko banjir, melindungi masyarakat, dan meningkatkan ketahanan wilayah terhadap bencana banjir.

Berdasarkan hasil analisis efektivitas dan efisiensi yang sudah di olah peneliti pada tahun 2017-2021 menunjukkan hasil rata-rata efektivitas 89% dan efisiensi 87% yang artinya pengelolaan keuangan di Telukjambe Timur di Kelola dengan optimal. Hal ini tentunya di dukung juga dengan pembangunan dan perbaikan infrastruktur yang sudah di lakukan oleh Pemerintah Daerah salah satunya Normalisasi Drainase Jalan Telukjambe Timur (Lampiran).

Akan tetapi pada Tahun 2020 merupakan tahun yang sangat signifikan dalam sejarah dunia karena menjadi tahun di mana pandemi COVID-19 merebak secara global. COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus korona jenis baru yang pertama kali terdeteksi di kota *Wuhan, China*, pada akhir tahun 2019. Virus tersebut kemudian menyebar dengan cepat ke seluruh dunia. *Lockdown* dan pembatasan, banyak negara menerapkan *lockdown* dan pembatasan sosial untuk menghentikan penyebaran virus, termasuk penutupan sekolah, bisnis, dan aktivitas sosial lainnya. Tekanan pada layanan kesehatan, banyak sistem kesehatan di seluruh dunia menghadapi tekanan besar karena lonjakan kasus COVID-19, yang menyebabkan kurangnya fasilitas dan perlengkapan medis yang memadai.

Dalam upaya mengatasi pandemi ini, pemerintah daerah Kecamatan Telukjambe Timur melakukan penyesuaian anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk berbagai sektor yang terkait dengan penanganan *COVID-19*. Dialokasikan untuk memperkuat infrastruktur kesehatan, membangun atau memperluas rumah sakit, klinik, atau fasilitas karantina. Pemerintah Kecamatan Telukjambe Timur juga meningkatkan kapasitas rumah sakit dengan memperoleh lebih banyak peralatan medis dan perlengkapan pelindung diri untuk tenaga medis. Pemerintah Daerah Kecamatan Telukjambe Timur mengikuti arahan dari pemerintah pusat dalam mendukung program vaksinasi *COVID-19* bagi masyarakat.

Berdasarkan observasi yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa pada indikator 'Tindakan Berasalan' sudah cukup maksimal. Indikator ini merumuskan kombinasi antara sikap pribadi dan atau orang banyak dan organisasi. Dalam hal ini dari Pemerintah Pusat kepada Kecamatan Telukjambe Timur lalu *output*-nya untuk masyarakat. Berdasarkan hasil analisis yang peneliti temui pada indikator Tindakan Beralasan oleh Dennis Dijkzeul dan Markus Moke (2005) sudah cukup maksimal. Hal ini dapat dilihat dari

mekanisme pada nilai harapan atau tujuan berdasarkan program yang sedang dijalankan dan program yang akan digunakan selanjutnya. Indikator di lapangan menunjukkan bahwa konsistensi Kecamatan Telukjambe Timur dalam menjalankan program yang diperintahkan oleh Pemerintah Pusat sudah dilakukan dengan baik.

#### SIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan hasil penelitian, dapat digambarkan bahwa pengelolaan keuangan daerah Kecamatan Telukjambe Timur menunjukkan cukup stabil. Hal ini disebabkan oleh pemerintah daerah Kecamatan Telukjambe Timur cukup optimal di dalam pengelolaan kekayaan sumber daya daerah yang tersedia dan untuk pendapatan asli daerah yang diterima sebagian besar mulai terserap dengan sepenuhnya sehingga sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Hal ini dapat dijelaskan dari hasil perhitungan yang menggunakan rasio efektivitas dan efisiensi pendapatan asli daerah, kemampuan penerimaan daerah Kecamatan Telukjambe Timur belum proporsional karena masih mengalami rasio yang naik turun. Pola perkembangan efektivitas pengelolaan keuangan Kecamatan Telukjambe Timur selama tahun 2017 - 2021 mengalami kestabilan dengan tingkat rata-rata per tahun sebesar 89,24% yang berarti pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur cukup efektif. Pola perkembangan efisiensi pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur selama tahun 2017 - 2021 cukup stabil dengan tingkat rata-rata per tahun sebesar 86,66% yang berarti pengelolaan keuangan daerah di Kecamatan Telukjambe Timur cukup efisien.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, H. (2016). *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik*. Salemba Empat.
- Bachtiar Arif, dkk. (2002). *Akuntansi Pemerintahan*. Salemba Empat.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Karawang. (2022). *Kecamatan Telukjambe Timur Dalam Angka 2022*.
- Government, A. (2022). Our plan for a stronger future will help build Australia and strengthen our regions. *Australian Government*. <https://budget.gov.au/2022-23/content/regions.htm#nineteen>
- Ihyaul Ulum, M. (2004). *Akuntansi Sektor Publik: Sebuah Pengantar*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- KABARKARAWANG. (2022). Sri Mulyani Ungkap Dana Pemda Tidur di Bank Rp 202 T, Provinsi Ini Paling Besar. *Kabar Karawang*. Sri Mulyani Ungkap Dana Pemda Tidur di

Bank Rp 202 T, Provinsi Ini Paling Besar

Karawang, P. (2021, September 23). Program Karawang Cerdas Janggal, Mahasiswa Geruduk Kantor Pemkab Tuntut Evaluasi. *Pelita Karawang*.

<https://www.pelitakarawang.com/2021/09/program-karawang-cerdas-janggal.html>

Kemenkeu. (2020). Data APBD Murni, realisasi APBD adalah data realisasi tahunan.

*Kemenkeu*. <https://djpk.kemenkeu.go.id/portal/data/apbd?tahun=2020&provinsi=--&pemda=-->

Merdeka.com. (2021). Sri Mulyani Kritik Pengelolaan Keuangan Daerah, Termasuk Dana Mengendap Rp173 Triliun. *Merdeka.Com*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, (2003).

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Direktorat Jenderal Bina Administrasi Keuangan Daerah*. (2007).

radarkarawang.id. (2020, January 3). 60 Persen APBDes Telukjambe untuk Infrastruktur.

*Radar Karawang*. <https://radarkarawang.id/telukjambe/60-persen-apbdes-telukjambe-untuk-infrastruktur/>

Ratmono.Dwi, & S. M. (2015). *Akuntansi Keuangan Daerah Berbasis Akrua*. UPP STIM YKPN.

Romney, M. B. dan P. J. S. (2018). *Accounting Information System Fourteenth Edition*.

Rusdi, A. (2004). *Akuntansi Pengantar*. UPP STIM YKPN.

Soemarso. (2004). *Akuntansi Suatu Pengantar Buku 1* (Edisi Keli). Salemba Empat.

Sugiyono. (2014). *Metode Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Alfabeta.

Tim Priangan Timur News. (2021, November). 216 Rumah di Kecamatan Telukjambe

Karawang Terendam Banjir Setinggi 1 Meter. *PRIANGANTIMUR.COM*.

[https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-1222971409/216-](https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-1222971409/216-rumah-di-kecamatan-telukjambe-karawang-terendam-banjir-setinggi-1-meter)

[rumah-di-kecamatan-telukjambe-karawang-terendam-banjir-setinggi-1-meter](https://priangantimurnews.pikiran-rakyat.com/jawa-barat/pr-1222971409/216-rumah-di-kecamatan-telukjambe-karawang-terendam-banjir-setinggi-1-meter)

A Siregar, F., & Syam BZ, F. (2017). Analisis Efektifitas dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Desa Di Kabupaten Deli Serdang). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi*, 2(4), 93–106.

Ayu, K., Lestari, D., Trisnadewi, A. A. A. E., Sri, L. G. P., Jayanti, E., Akuntansi, P. S., Ekonomi, F., & Warmadewa, U. (2020). *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa Analisis Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Pada*. 1(1), 15–20.

Damayanti, A., Suriyanto, S., Sarong, S., & Baso, R. (2021). Analisis Pengelolaan Keuangan Dalam Menilai Kinerja Keuangan Desa. *Jurnal Ilmiah Ecosystem*, 21(3), 654–666.

<https://doi.org/10.35965/eco.v21i3.1257>

- Iin Ivanda Listari, Kukuh Harianto, & Trisnia Widuri. (2022). Analisis Rasio Efektivitas, Rasio Efisiensi, Dan Rasio Kemandirian Dalam Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (2018-2021). *Jurnal Mahasiswa: Jurnal Ilmiah Penalaran Dan Penelitian Mahasiswa*, 4(3), 129–140. <https://doi.org/10.51903/jurnalmahasiswa.v4i3.396>
- Khadlirin, A., Mulyantomo, E., & Widowati, S. Y. (2021). Analisis Efisiensi Dan Efektifitas Pengelolaan Dana Desa (Study Empiris Dana Desa di Desa Tegalarum Kabupaten Demak Tahun 2016-2020). *Solusi*, 19(2), 50–65. <https://doi.org/10.26623/slsi.v19i2.3162>
- Priyono, N., Wahyudi, M., & Prijanto, W. J. (2022). Efektifitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Kasus Di Desa Purwodadi Kecamatan Tegalrejo Kabupaten Magelang). *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 1(1), 51. <https://doi.org/10.52353/senama.v1i1.235>
- Pujiastuti, D., Sa'diyah, K., Lestari, S. I., Nur, K., & Mustofa, M. T. L. (2020). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KECAMATAN UNGARAN KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2017-2018. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 01.
- Sarianti, L., & Irama, O. N. (2021). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Anggaran dan Belanja Desa (Studi Kasus Desa Kuala Bangka). *Jurnal Seminar Nasional Sains Dan Teknologi Informasi (SENAS)*, ISBN 987-623-92614-6-4, 30–32.
- Trianto Anton. (2016). ANALISIS EFEKTIVITAS DAN EFISIENSI PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI KOTA PALEMBANG. *Akuntansi*, 12. <http://fe.ummetro.ac.id/ejournal/index.php/JA/article/view/92>
- Widianingsih, R., Riza, N., & ... (2019). Analisis Tingkat Efisiensi Dan Efektivitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang. 70–74. <http://jkm.stiewidyagalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/197> Analisis Tingkat Efisiensi Dan Efektifitas Terhadap Pengelolaan Keuangan Di Desa Pulo Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang, 70–74. <http://jkm.stiewidyagalumajang.ac.id/index.php/jra/article/view/197>